BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

KUA di Kota Banjarbaru

a. KUA Cempaka

Wawancara yang dilakukan dengan petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) Cempaka memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai dinamika yang terjadi dalam praktik pernikahan ulang di masyarakat, khususnya berkaitan dengan pasangan yang sebelumnya menikah secara siri. Dalam wawancara ini, narasumber menjelaskan secara terperinci mengenai kasus-kasus yang mereka tangani serta tantangan yang muncul dalam proses pencatatan ulang pernikahan di lembaga tersebut.

Sebagaimana kasus yang ditangani, banyak pasangan yang datang ke KUA Cempaka merupakan pasangan yang sebelumnya telah menikah secara tidak tercatat atau secara siri, dan kemudian ingin melegalkan hubungan pernikahan mereka melalui jalur resmi negara. Keinginan untuk mencatatkan pernikahan secara resmi ini umumnya muncul setelah mereka menghadapi berbagai kesulitan administratif, seperti saat mengurus akta kelahiran anak, mendaftarkan anak ke sekolah, atau saat memerlukan dokumen resmi untuk

kebutuhan lainnya. Dalam hal ini, KUA menjadi tujuan utama mereka setelah proses isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama mengalami hambatan.

Narasumber menyampaikan bahwa dalam banyak kasus, pasangan terlebih dahulu mencoba mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Namun, tidak semua permohonan tersebut diterima. Banyak di antara mereka yang ditolak karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pengadilan agama. Salah satu faktor yang paling umum menyebabkan penolakan adalah usia pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal yang disyaratkan dalam undang-undang. Saat ini, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁸¹ Namun dalam kenyataannya, banyak pasangan menikah siri pada usia yang lebih muda dari ketentuan tersebut.⁸²

Selain persoalan usia, narasumber juga menjelaskan bahwa permasalahan perwalian menjadi tantangan yang cukup sering ditemui dalam proses isbat nikah maupun pencatatan ulang pernikahan. Dalam beberapa kasus, wali nikah yang sah masih hidup tetapi tidak dilibatkan atau tidak memberikan izin dalam pernikahan siri tersebut. Situasi ini sering menimbulkan penolakan dari pihak pengadilan agama ketika pasangan mengajukan permohonan isbat nikah. Bahkan, ada kasus di mana wali yang sah tidak mengetahui bahwa

⁸¹Lihat Undang-Undang Pasal 7 No. 16 Tahun 2019 Tentang Undang-Undang Perkawinan.

⁸²Wawancara dengan KUA Cempaka pada 25 Januari 2024, Pukul 09.45.

anaknyanya telah menikah secara siri, sehingga ketika proses pencatatan ulang hendak dilakukan, muncul konflik baru yang berkaitan dengan keluarga.

Menurut keterangan narasumber, banyak pasangan yang akhirnya kembali ke KUA untuk menikah ulang setelah permohonan isbat nikah mereka ditolak. Namun, proses pernikahan ulang ini bukan sekadar upaya untuk mendapatkan buku nikah semata, melainkan merupakan bentuk dari pencatatan ulang yang harus dilakukan dari awal sesuai dengan prosedur hukum dan administratif yang berlaku.⁸³ Narasumber juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga, seperti pengadilan agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta lembaga pendidikan⁸⁴ dalam memastikan bahwa pencatatan pernikahan dilakukan dengan baik.

Dalam wawancara tersebut, dijelaskan bahwa praktik pernikahan ulang yang dilakukan di KUA sebenarnya bukanlah proses pengesahan pernikahan siri secara langsung. Justru, proses ini merupakan tahapan baru yang berdiri sendiri, di mana pasangan harus memulai dari awal, seolah-olah belum pernah menikah sebelumnya. Oleh sebab itu, semua syarat administratif dan hukum harus dipenuhi tanpa terkecuali. Petugas KUA tidak dapat serta-merta

⁸³Dalam pelaksanaannya, KUA Cempaka menegaskan bahwa seluruh proses pencatatan harus dilengkapi dengan dokumen yang lengkap dan valid. Mereka tidak dapat memproses pencatatan pernikahan tanpa adanya kelengkapan dokumen, termasuk bukti identitas, surat keterangan belum menikah, serta izin dari wali jika diperlukan.

⁸⁴Misalnya, ketika pasangan telah memiliki anak dan ingin mendaftarkan anak ke sekolah, dokumen yang berkaitan dengan status pernikahan orang tua menjadi salah satu persyaratan administratif yang penting. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan yang sah dan resmi bukan hanya berfungsi sebagai pengakuan hukum terhadap hubungan suami istri, tetapi juga berdampak pada akses anak terhadap hak-haknya sebagai warga negara.

mencatatkan pernikahan ulang tanpa adanya proses verifikasi dan kelengkapan dokumen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendati demikian, narasumber juga mengakui bahwa terdapat tantangan tersendiri dalam menangani pasangan-pasangan yang memiliki riwayat pernikahan siri. Salah satunya adalah kesulitan dalam melakukan verifikasi status pernikahan sebelumnya. Karena pernikahan siri tidak tercatat secara resmi, tidak terdapat data atau dokumen yang bisa dijadikan acuan untuk memastikan apakah pasangan tersebut memang pernah menikah secara siri atau tidak. Dalam situasi seperti ini, petugas KUA hanya bisa bergantung pada pengakuan pasangan dan dokumen administratif yang diserahkan. Ini menjadi salah satu titik lemah dalam sistem pencatatan pernikahan yang ada saat ini.⁸⁵

Selain itu, narasumber juga menyampaikan bahwa tekanan sosial dari keluarga maupun masyarakat sekitar sering kali memengaruhi jalannya proses pencatatan pernikahan ulang.⁸⁶ Wawancara ini juga mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan masih relatif rendah. Banyak pasangan yang menganggap bahwa pencatatan pernikahan hanyalah formalitas yang tidak begitu penting, selama mereka telah menikah secara agama. Pandangan ini menjadi salah satu faktor utama yang

⁸⁵Wawancara dengan KUA Cempaka pada 25 Januari 2024, Pukul 09.45.

⁸⁶Dalam beberapa kasus, keluarga dari pihak perempuan atau tokoh masyarakat setempat meminta agar pernikahan segera dicatatkan tanpa mempertanyakan status hukum sebelumnya. Hal ini menempatkan petugas KUA dalam posisi yang cukup dilematis, di satu sisi harus menjalankan aturan hukum secara tegas, namun di sisi lain harus menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitar.

menyebabkan banyak pasangan memilih jalur pernikahan siri, dan baru menyadari pentingnya pencatatan resmi ketika mereka menghadapi hambatan administratif dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, narasumber menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang sah. KUA memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai implikasi hukum dari pernikahan yang tidak dicatat secara resmi. Selain itu, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat juga dianggap penting dalam menyampaikan informasi ini secara lebih efektif dan membumi kepada masyarakat.

Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, KUA Cempaka menyatakan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang maksimal, sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸⁷ Secara keseluruhan, wawancara dengan petugas KUA Cempaka memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai tantangan yang dihadapi dalam menangani pernikahan ulang, terutama yang berkaitan dengan pasangan yang sebelumnya menikah siri. Proses pencatatan ulang bukan hanya memerlukan ketelitian administratif, tetapi juga sensitivitas sosial dalam menghadapi beragam kondisi dan latar belakang pasangan yang datang ke KUA. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara lembaga, edukasi

⁸⁷Namun, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pencatatan pernikahan, dibutuhkan sistem yang lebih terintegrasi antara KUA, pengadilan agama, dan lembaga kependudukan lainnya. Dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan proses verifikasi terhadap riwayat pernikahan pasangan bisa dilakukan dengan lebih akurat dan cepat.

masyarakat, dan kebijakan yang adaptif agar setiap pernikahan yang dilakukan dapat dicatat secara resmi dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pasangan dan anak-anak mereka.

b. KUA Banjarbaru Utara

Dalam wawancara dengan pihak KUA Banjarbaru Utara, salah satu topik utama yang dibahas adalah perbedaan pandangan mengenai istilah "*bahilah*" dalam konteks pernikahan ulang. Narasumber menjelaskan bahwa istilah "*bahilah*" pada dasarnya bukan berasal dari konteks pernikahan, melainkan lebih sering digunakan dalam tradisi adat Banjar yang berkaitan dengan praktik sosial atau keagamaan tertentu, khususnya yang menyangkut kematian. Oleh karena itu, menurut mereka, penggunaan istilah "*bahilah*" untuk merujuk pada pernikahan ulang dianggap tidak relevan dan kurang tepat secara konteks sosial maupun hukum.⁸⁸

Menurut narasumber, praktik yang lebih sering terjadi bukanlah pernikahan ulang dalam arti sesungguhnya, melainkan pencatatan ulang pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan secara siri atau tidak tercatat di KUA. Hal ini biasanya terjadi karena berbagai kendala dalam proses isbat nikah yang diajukan oleh pasangan ke pengadilan agama.⁸⁹

⁸⁸Wawancara dengan KUA Banjarbaru Utara pada 29 Januari 2024, Pukul 08.10.

⁸⁹Ketika isbat nikah ditolak, pasangan biasanya akan kembali ke KUA dengan niat untuk menikah ulang secara resmi dan memenuhi semua persyaratan administrasi yang diwajibkan.

Narasumber menyampaikan bahwa dari pengalaman mereka di lapangan, tidak semua permohonan isbat nikah diterima oleh pengadilan agama. Banyak di antaranya yang ditolak karena kurangnya dokumen pendukung, usia pasangan yang belum memenuhi syarat minimal yang ditentukan undang-undang, atau karena persoalan wali nikah yang tidak sah secara hukum Islam.⁹⁰ Dalam beberapa kasus, wali yang sah masih hidup namun tidak terlibat dalam pernikahan tersebut, sehingga permohonan isbat nikah dianggap cacat hukum dan tidak dapat dilanjutkan.⁹¹

Apabila isbat nikah ditolak, KUA Banjarbaru Utara hanya dapat memproses pernikahan ulang jika seluruh dokumen dan persyaratan administratif telah lengkap. Hal ini termasuk akta kelahiran calon pengantin, surat keterangan belum menikah dari kelurahan, dan persetujuan dari wali nikah yang sah. Narasumber menekankan bahwa prosedur ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pasangan serta anak-anak yang mungkin telah lahir dari pernikahan siri sebelumnya.

Narasumber juga menggarisbawahi bahwa pencatatan pernikahan bukan hanya tentang legalitas, tetapi juga tentang kejujuran dan komitmen terhadap prinsip hukum yang berlaku. Mereka menolak praktik yang bertujuan untuk

⁹⁰Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang wali nikah, khususnya dalam konteks perkawinan bagi masyarakat muslim yang mengikuti syariat Islam. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan dalam konteks Islam, kehadiran wali nikah adalah salah satu rukun perkawinan yang penting. Lihat juga pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

⁹¹Wawancara dengan KUA Banjarbaru Utara pada 29 Januari 2024, Pukul 08.10.

mengakali sistem hukum demi memperoleh buku nikah tanpa melalui jalur hukum yang seharusnya, seperti isbat nikah. Menurut narasumber, pernikahan yang dilakukan dengan motif menyembunyikan fakta atau memanipulasi status sebelumnya tidak mencerminkan nilai kesucian pernikahan dalam Islam.⁹²

KUA Banjarbaru Utara juga menyampaikan bahwa mereka memiliki pendekatan yang lebih konservatif dalam menangani kasus pernikahan ulang. Mereka menekankan pentingnya verifikasi setiap dokumen dan keabsahan setiap elemen dalam pernikahan, mulai dari usia, status hukum, hingga wali nikah. Mereka tidak ingin mencatatkan pernikahan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.⁹³ Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pencatatan pernikahan sejak awal.

Menurut narasumber, tantangan terbesar dalam menangani pernikahan ulang adalah ketika masyarakat tidak sepenuhnya terbuka mengenai riwayat pernikahan mereka. Dalam beberapa kasus, pasangan datang ke KUA dengan mengaku belum pernah menikah, padahal faktanya mereka telah menikah siri dan bahkan memiliki anak. Karena tidak ada sistem pencatatan terpadu antara KUA dan instansi lain seperti pengadilan agama, KUA tidak memiliki sarana

⁹²Wawancara dengan KUA Banjarbaru Utara pada 29 Januari 2024, Pukul 08.10.

⁹³Dalam wawancara ini, narasumber juga menceritakan sejumlah kasus di mana pasangan yang telah menikah siri selama bertahun-tahun baru menyadari pentingnya pencatatan pernikahan ketika anak-anak mereka menghadapi kendala dalam pengurusan akta kelahiran dan pendaftaran sekolah. Di sisi lain, ada pula pasangan yang baru mengurus pencatatan pernikahan karena akan melakukan perjalanan ke luar negeri, mengajukan kredit, atau mengurus hak waris.

untuk melakukan verifikasi riwayat pernikahan secara menyeluruh. Hal ini membuat KUA harus sangat berhati-hati dalam menerima permohonan pernikahan ulang.

Narasumber juga menjelaskan bahwa tekanan sosial dari keluarga atau tokoh masyarakat kerap kali menjadi faktor pendorong pasangan untuk segera mencatatkan pernikahan mereka tanpa mengungkapkan pernikahan siri sebelumnya. Dalam beberapa kasus, keluarga datang langsung ke KUA dan meminta agar proses pernikahan disegerakan karena adanya acara adat atau keperluan sosial lainnya. Dalam situasi seperti ini, KUA harus bersikap tegas dan berpegang pada prosedur yang ada, meskipun itu berarti menunda atau bahkan menolak pencatatan pernikahan.

Selain itu, wawancara ini juga mengungkapkan bahwa KUA Banjarbaru Utara secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan dampaknya terhadap kehidupan hukum dan sosial pasangan. Mereka mengadakan penyuluhan hukum melalui kerja sama dengan penyuluh agama Islam dan tokoh masyarakat, baik di lingkungan kelurahan maupun melalui forum-forum keagamaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pernikahan yang sah menurut negara dan agama.

Dalam hal pencatatan ulang, narasumber menegaskan bahwa semua proses dilakukan dari awal, seolah-olah pasangan tersebut belum pernah menikah. Hal ini berarti bahwa seluruh syarat administrasi harus dipenuhi,

termasuk permohonan nikah, pemeriksaan kesehatan, pembayaran biaya nikah jika dilakukan di luar kantor, serta kehadiran wali yang sah dan dua orang saksi.⁹⁴

Narasumber juga menyampaikan bahwa KUA Banjarbaru Utara memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan, termasuk melalui digitalisasi sistem administrasi. Mereka mulai mengimplementasikan sistem pendaftaran nikah secara daring melalui aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah), yang memungkinkan pasangan untuk mendaftarkan diri secara online. Namun, meskipun pendaftaran dapat dilakukan secara digital, pemeriksaan dokumen dan verifikasi tetap dilakukan secara langsung di kantor KUA.⁹⁵

Dalam bagian akhir wawancara, narasumber kembali menegaskan bahwa KUA bukan hanya lembaga administratif, tetapi juga lembaga edukatif dan pembina. Oleh karena itu, mereka berharap masyarakat lebih sadar akan pentingnya proses pernikahan yang sah dan tercatat secara resmi. Mereka juga mengajak masyarakat untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada petugas KUA agar proses pencatatan dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

⁹⁴KUA tidak akan mengeluarkan buku nikah tanpa melalui proses ini, karena itu merupakan bentuk komitmen mereka dalam menjaga integritas administrasi negara.

⁹⁵Wawancara dengan KUA Banjarbaru Utara pada 29 Januari 2024, Pukul 08.10.

Secara keseluruhan, wawancara dengan KUA Banjarbaru Utara memberikan gambaran tentang bagaimana lembaga ini menghadapi dinamika praktik pernikahan ulang di masyarakat, serta tantangan-tantangan yang menyertainya. Dengan pendekatan yang hati-hati dan berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, KUA Banjarbaru Utara berupaya memastikan bahwa setiap pernikahan yang dicatat tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga mencerminkan kejujuran dan komitmen pasangan dalam membina rumah tangga yang berkah dan terlindungi secara hukum.

c. KUA Banjarbaru Selatan

Dalam rangka mendalami lebih lanjut mengenai praktik pernikahan ulang yang terjadi dalam masyarakat Banjarbaru, khususnya yang menyangkut dimensi hukum dan keagamaan, dilakukan wawancara dengan salah satu lembaga negara yang berwenang dalam urusan pernikahan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Selatan.

Berdasarkan wawancara tersebut terungkap bahwa pernikahan ulang telah menjadi fenomena yang cukup sering dijumpai, terutama ketika dikaitkan dengan praktik pernikahan siri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Pernikahan siri, yang oleh masyarakat sering dipahami sebagai pernikahan sah menurut agama namun tidak dicatat secara resmi oleh negara, memunculkan sejumlah persoalan serius, terutama ketika pasangan yang bersangkutan menginginkan keabsahan administratif atas hubungan mereka. Dalam konteks

ini, pihak KUA menjelaskan bahwa tidak sedikit pasangan yang telah menikah secara siri kemudian datang untuk mengurus pernikahan ulang, dengan harapan memperoleh buku nikah sebagai bukti resmi yang diakui oleh negara.⁹⁶

Langkah awal yang umum dilakukan oleh pasangan yang menikah secara siri adalah mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah sendiri merupakan upaya hukum untuk mendapatkan pengesahan dari pengadilan atas suatu pernikahan yang telah dilangsungkan namun belum tercatat di KUA.⁹⁷

Banyak faktor yang menjadi penyebab ditolaknya permohonan tersebut, seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat hukum pernikahan, tidak adanya bukti kuat bahwa pernikahan telah terjadi, atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Ketika permohonan isbat nikah tidak dikabulkan oleh pengadilan, maka tidak jarang pasangan kembali mendatangi KUA untuk melakukan pernikahan ulang secara resmi. Dalam hal ini, pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan dengan prosedur yang sesuai ketentuan hukum positif, lengkap dengan pencatatan, pembacaan akad di depan penghulu, dan pelaksanaan seluruh syarat administrasi. Tujuannya tentu saja adalah agar pasangan tersebut

⁹⁶Wawancara dengan KUA Banjarbaru Selatan pada 24 Januari 2024, Pukul 09.37.

⁹⁷Permohonan ini diajukan sebagai dasar hukum agar pernikahan tersebut dapat diakui oleh negara dan dicatat secara administratif. Namun dalam praktiknya, tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan.

dapat memperoleh pengakuan hukum atas hubungan mereka, yang dibuktikan dengan diterbitkannya buku nikah oleh KUA.

Narasumber dari KUA Banjarbaru Selatan mengungkapkan bahwa pihaknya tetap memiliki kewajiban untuk menerima permohonan pernikahan dari siapa pun selama syarat administrasi terpenuhi. Hal ini mencerminkan sikap KUA yang netral dan profesional, yang lebih mengutamakan pelayanan publik berbasis aturan dan regulasi ketimbang menghakimi latar belakang pernikahan seseorang. Namun demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa pernikahan ulang, terutama yang bertujuan untuk “melegalkan” pernikahan siri, kerap menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat maupun kalangan internal lembaga keagamaan.⁹⁸

Salah satu aspek menarik yang juga muncul dalam wawancara adalah soal penggunaan istilah "*bahilah*". Istilah ini, menurut narasumber, kerap disalahartikan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan untuk menyiasati status pernikahan siri. Dalam pemahaman populer, "*bahilah*" dianggap sebagai solusi untuk melegalkan hubungan pernikahan yang tidak tercatat, namun menurut narasumber, pemaknaan tersebut kurang tepat. Dalam literatur fikih, istilah "*bahilah*" biasanya digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang dilakukan dalam rangka memungkinkan suami-istri yang telah bercerai talak tiga untuk dapat rujuk kembali, di mana perempuan tersebut harus menikah dengan pria lain terlebih dahulu dan

⁹⁸Wawancara dengan KUA Banjarbaru Selatan pada 24 Januari 2024, Pukul 09.37.

kemudian bercerai. Bahkan, ada kalanya istilah ini digunakan dalam konteks orang yang telah meninggal dunia, sehingga tidak tepat apabila istilah tersebut dikaitkan secara langsung dengan praktik pernikahan ulang yang kini marak terjadi.

Wawancara ini juga menyinggung beberapa persoalan hukum yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan pernikahan ulang. Salah satunya adalah soal masa iddah.⁹⁹ Apabila masa iddah belum berakhir, maka pernikahan tidak dapat dilakukan, dan hal ini menjadi salah satu bentuk kendala yang harus diperhatikan dalam praktik di lapangan.¹⁰⁰

Masalah lain yang kerap muncul adalah soal wali nikah. Dalam pernikahan Islam, keberadaan wali bagi mempelai perempuan merupakan syarat sahnya pernikahan. Penentuan wali yang sah secara agama bisa menjadi rumit, apalagi jika pernikahan sebelumnya dilakukan secara siri tanpa sepengetahuan keluarga. Dalam situasi seperti ini, KUA harus memastikan bahwa wali yang hadir dalam akad nikah adalah wali nasab yang sah, dan apabila tidak ada, maka dapat digantikan dengan wali hakim. Hal ini

⁹⁹Masa iddah merupakan periode tunggu yang wajib dilalui oleh seorang perempuan sebelum ia diperbolehkan menikah kembali, setelah perceraian atau ditinggal mati oleh suami sebelumnya. Ketentuan mengenai masa iddah ini tidak hanya diatur dalam syariat Islam, tetapi juga dipertimbangkan secara administratif dalam proses pencatatan pernikahan di KUA.

¹⁰⁰Mendaftar nikah sebelum masa iddah berakhir, baik iddah cerai maupun iddah kematian, hukumnya adalah haram dan tidak sah. Peraturan ini berlaku untuk perempuan yang dicerai atau ditinggal meninggal suaminya, dan tidak diperbolehkan untuk menikah lagi hingga masa iddah nya selesai.

memerlukan verifikasi mendalam, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum pernikahan Islam.

Selain itu, batas usia minimal untuk menikah juga menjadi perhatian penting. Menurut Undang-Undang Perkawinan yang telah direvisi, usia minimal menikah bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun.¹⁰¹ KUA sebagai pelaksana teknis di lapangan wajib memastikan bahwa ketentuan ini dipatuhi. Apabila calon mempelai berada di bawah usia tersebut, maka harus ada dispensasi dari pengadilan, yang lagi-lagi menambah kompleksitas administratif dalam pelaksanaan pernikahan ulang.

Dari sisi sosial, praktik pernikahan ulang ini juga mencerminkan adanya dinamika yang cukup kompleks. Banyak pasangan yang merasa tertekan secara sosial karena status pernikahan siri yang mereka jalani tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai, khususnya dalam hal pencatatan anak, hak waris, dan pengurusan dokumen kependudukan. Ketika hubungan mereka tidak diakui oleh negara, berbagai kesulitan pun muncul, mulai dari pendaftaran anak ke sekolah, akses layanan kesehatan, hingga pengurusan dokumen seperti Kartu Keluarga dan akta kelahiran.

Maka dari itu, keinginan pasangan untuk menikah ulang secara resmi sebenarnya bukan sekadar soal formalitas, melainkan merupakan kebutuhan mendasar untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Di sisi lain,

¹⁰¹Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

terdapat pula tekanan dari lingkungan sosial atau keluarga besar yang menuntut agar pernikahan tersebut disahkan secara hukum, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial dari pasangan yang bersangkutan. Dalam wawancara ini juga tergambar dengan jelas bahwa peran KUA tidak hanya sebatas sebagai lembaga pencatat pernikahan, melainkan juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab edukatif dan konsultatif. Petugas KUA kerap kali memberikan bimbingan kepada pasangan calon pengantin mengenai syarat dan rukun nikah, hukum-hukum pernikahan dalam Islam, serta prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap pernikahan, termasuk pernikahan ulang, dilaksanakan secara sah, terhormat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Wawancara ini dengan demikian tidak hanya memberikan informasi teknis mengenai prosedur pernikahan ulang, tetapi juga menggambarkan betapa kompleksnya persoalan ini dari berbagai sisi. Baik dari segi hukum, agama, maupun sosial, praktik pernikahan ulang merupakan cerminan dari dinamika masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang utuh serta pendekatan yang bijak dalam menanganinya. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas pernikahan, diharapkan ke depan akan semakin sedikit pasangan yang memilih jalur pernikahan siri tanpa pencatatan. Peran lembaga seperti KUA menjadi sangat krusial dalam memberikan edukasi, pelayanan, serta perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan melalui wawancara ini, kita dapat melihat

bagaimana KUA Banjarbaru Selatan menjalankan fungsi tersebut dengan penuh tanggung jawab, kepekaan, serta komitmen terhadap aturan yang berlaku.

d. KUA Landasan Ulin

Wawancara yang dilakukan dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai problematika yang kerap muncul dalam praktik pernikahan ulang. Pembahasan dalam wawancara ini secara khusus menyoroti aspek hukum, administratif, serta pandangan agama terhadap pernikahan ulang, terutama yang berkaitan dengan pasangan yang sebelumnya telah menikah secara siri. Dalam konteks ini, praktik pernikahan ulang tidak dapat dipandang secara sederhana sebagai pernikahan kedua, melainkan sebagai upaya untuk memperoleh legitimasi hukum atas pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi.

Menurut penjelasan dari narasumber di KUA Landasan Ulin, tidak sedikit pasangan yang datang untuk melakukan pernikahan ulang setelah sebelumnya menikah secara siri. Motivasi utama mereka umumnya adalah untuk mendapatkan buku nikah yang merupakan bukti resmi telah terjadinya akad nikah yang sah menurut negara. Buku nikah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formalitas semata, tetapi juga menjadi dokumen penting dalam berbagai urusan sipil, seperti pembuatan Kartu Keluarga, pencatatan kelahiran anak, hak waris, dan perlindungan hukum dalam hal perceraian.¹⁰²

¹⁰²Wawancara dengan KUA Landasan Ulin pada 24 Januari 2024, Pukul 14.10.

Oleh karena itu, banyak pasangan akhirnya menyadari bahwa meskipun telah menikah secara agama, pernikahan mereka tetap membutuhkan pengakuan negara melalui pencatatan resmi di KUA.

Sebagai langkah awal untuk melegalkan pernikahan siri, pasangan biasanya mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Proses isbat nikah merupakan mekanisme formal yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia untuk mengesahkan pernikahan yang telah terjadi, namun tidak dicatat oleh negara.¹⁰³

Ketika upaya melalui pengadilan agama tidak membuahkan hasil, pasangan tersebut sering kali kembali ke KUA dengan harapan dapat melangsungkan pernikahan ulang secara resmi. Dalam hal ini, mereka menjalani akad nikah ulang sesuai prosedur hukum dan administrasi yang berlaku. Narasumber menjelaskan bahwa selama semua syarat administrasi terpenuhi, KUA berkewajiban untuk melayani permohonan pernikahan tersebut.¹⁰⁴ Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa wali nikah masih hidup,

¹⁰³Pengesahan melalui isbat nikah memungkinkan pasangan memperoleh dokumen hukum berupa buku nikah tanpa harus mengulang akad pernikahan. Namun demikian, dalam kenyataannya, permohonan isbat nikah tidak selalu berjalan mulus. Banyak permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti tidak adanya dokumen pendukung, tidak adanya saksi, atau karena terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.

¹⁰⁴Namun, proses ini tetap harus melalui verifikasi yang ketat, khususnya jika pernikahan sebelumnya telah menimbulkan konsekuensi hukum atau sosial tertentu. Salah satu hambatan terbesar yang sering muncul dalam proses ini adalah masalah perwalian.

namun pernikahan sebelumnya dilakukan tanpa seizin atau tanpa kehadiran wali tersebut.

Hal ini menjadi dasar penolakan isbat nikah oleh pengadilan, karena keterlibatan wali adalah syarat sahnya akad nikah menurut syariat Islam. Wali nasab yakni wali yang memiliki hubungan darah langsung dengan mempelai Perempuan harus memberikan persetujuan atas pernikahan tersebut. Jika tidak ada wali nasab, atau jika wali menolak tanpa alasan syar'i, maka peran wali dapat dialihkan kepada wali hakim. Namun, dalam banyak kasus, ketidakhadiran wali dalam pernikahan siri sebelumnya membuat status pernikahan menjadi tidak sah secara hukum Islam, sehingga tidak dapat disahkan melalui isbat.

Masalah lain yang juga cukup sering terjadi adalah berkaitan dengan batas usia minimal untuk menikah. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah mengalami revisi, usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, dalam praktiknya, banyak pasangan yang menikah secara siri pada usia yang lebih muda, yang artinya tidak memenuhi batas usia legal.¹⁰⁵

Dalam kondisi seperti ini, pasangan tersebut wajib mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan agama. Tanpa adanya putusan dispensasi, pernikahan mereka tidak dapat dicatatkan secara resmi di KUA. Hal ini penting sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan,

¹⁰⁵Wawancara dengan KUA Landasan Ulin pada 24 Januari 2024, Pukul 14.10.

sekaligus sebagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini yang masih cukup tinggi di beberapa daerah.

Dalam wawancara juga dibahas mengenai pemahaman masyarakat terhadap istilah "*bahilah*", yang secara keliru sering dikaitkan dengan praktik pernikahan ulang. Istilah ini, menurut narasumber, lebih tepat jika dikaitkan dengan konteks keagamaan yang lain, seperti ibadah atau amalan yang diperuntukkan bagi orang yang telah meninggal dunia, sebagai bentuk harapan agar dosa-dosa mereka diampuni.¹⁰⁶

Narasumber menegaskan bahwa penggunaan istilah "*bahilah*" dalam konteks ini adalah tidak tepat dan justru menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam pandangan agama, pernikahan seharusnya dilakukan secara transparan dan berdasarkan persetujuan dari seluruh pihak yang berkepentingan, bukan dengan cara menyasati aturan.

Penting pula dicatat bahwa dalam wawancara ini ditekankan peran penting KUA Landasan Ulin dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Banyak pasangan yang baru menyadari pentingnya memiliki buku nikah setelah mereka menghadapi kesulitan administratif, seperti saat mendaftarkan anak ke sekolah, mengurus

¹⁰⁶Akan tetapi, dalam beberapa kasus, masyarakat menggunakan istilah "*bahilah*" untuk merujuk pada praktik "mengakali" hukum demi melegalkan hubungan yang tidak sah secara hukum negara. Misalnya, dengan menikah ulang untuk mendapatkan status hukum baru, meskipun sebenarnya akad pertama dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang sah.

kartu identitas anak, atau ketika berurusan dengan instansi pemerintah yang memerlukan bukti pernikahan resmi. Selain itu, ketiadaan dokumen pernikahan yang sah juga kerap menimbulkan persoalan serius ketika terjadi perceraian atau saat salah satu pasangan meninggal dunia, terutama terkait hak waris dan hak asuh anak. Dalam situasi ini, pihak yang paling dirugikan adalah perempuan dan anak-anak, karena mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-hak mereka.

Melalui wawancara ini, tergambar dengan cukup jelas bahwa proses pencatatan pernikahan bukan hanya merupakan formalitas administratif belaka, tetapi merupakan bagian penting dari sistem perlindungan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, KUA sebagai lembaga negara yang bertugas dalam urusan keagamaan dan administrasi pernikahan memiliki peran strategis dalam membina masyarakat agar memahami pentingnya legalitas pernikahan. KUA tidak hanya bertugas mencatatkan pernikahan, tetapi juga memberikan bimbingan pranikah, melakukan verifikasi dokumen, serta memberikan penjelasan hukum kepada pasangan yang akan menikah.

Secara keseluruhan, wawancara ini memperlihatkan bagaimana KUA Landasan Ulin menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menghadapi kompleksitas kasus pernikahan ulang. Tidak hanya sekadar mencatatkan pernikahan, tetapi juga memberikan solusi yang adil dan sesuai hukum bagi pasangan-pasangan yang ingin memperbaiki status hukum hubungan mereka. Narasumber menekankan bahwa dalam setiap kasus pernikahan ulang, terutama

bagi mereka yang sebelumnya menikah secara siri, KUA hanya dapat mencatatkan pernikahan apabila telah ada putusan dari pengadilan agama atau jika seluruh syarat hukum dan administratif telah terpenuhi. Dengan demikian, KUA tetap konsisten menjaga integritas hukum dalam proses pencatatan, sambil tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

e. KUA Liang Anggang

Wawancara yang dilakukan dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang Anggang memberikan wawasan yang kaya dan mendalam mengenai fenomena pernikahan ulang, terutama dalam kaitannya dengan dampak hukum, administratif, dan sosial yang timbul dari praktik pernikahan siri. Dalam praktik sehari-hari, pihak KUA sering kali menjadi garda depan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pasangan yang sebelumnya menikah secara tidak tercatat secara hukum negara. Wawancara ini mengangkat berbagai tantangan yang muncul dalam proses legalisasi pernikahan ulang, serta bagaimana KUA sebagai institusi formal menjalankan perannya dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku.

Dalam penjelasannya, narasumber dari KUA Liang Anggang mengungkapkan bahwa banyak pasangan yang datang dengan niat untuk melegalkan pernikahan siri mereka melalui mekanisme isbat nikah di pengadilan agama. Isbat nikah merupakan sarana hukum yang disediakan bagi pasangan yang menikah secara agama namun belum mencatatkan

pernikahannya secara resmi di negara. Harapannya, dengan putusan isbat, pasangan bisa mendapatkan buku nikah tanpa harus mengulang akad. Namun demikian, data yang disampaikan menunjukkan bahwa dari dua belas permohonan isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama, hanya tiga yang dikabulkan, sementara sembilan lainnya ditolak.¹⁰⁷

Penolakan ini bukan tanpa alasan. Dalam praktiknya, pengadilan memiliki parameter hukum yang ketat dalam menyetujui isbat nikah, dan setiap permohonan akan diverifikasi berdasarkan kelengkapan dokumen, keabsahan wali nikah, serta kesesuaian usia pasangan dengan batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang. Banyak dari permohonan yang ditolak karena salah satu atau lebih dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi.

Contohnya, beberapa pasangan masih berusia di bawah ketentuan hukum, yakni 19 tahun, ketika pernikahan dilakukan, atau terdapat kesalahan dalam hal perwalian seperti wali yang tidak sah atau tidak hadir dalam akad nikah. Selain itu, banyak pasangan tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan bahwa pernikahan siri telah berlangsung dengan benar.

Jika permohonan isbat nikah ditolak, banyak pasangan kemudian kembali ke KUA dengan harapan dapat menikah ulang secara resmi agar memperoleh buku nikah dan pencatatan sah dari negara. Namun, seperti dijelaskan oleh narasumber, proses pernikahan ulang ini tidak dapat dilakukan

¹⁰⁷Wawancara dengan KUA Liang Anggang pada 25 Januari 2024, Pukul 15.15.

secara sembarangan. KUA tetap terikat pada ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku, dan setiap pasangan yang ingin menikah ulang harus memenuhi seluruh persyaratan tersebut, termasuk identitas resmi, izin dari wali yang sah, serta surat keterangan belum menikah dari desa atau kelurahan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan siri sering kali menjadi akar dari berbagai masalah hukum yang muncul kemudian, terutama ketika pasangan telah memiliki anak dan mulai menghadapi tuntutan administratif dari negara. Narasumber menceritakan bahwa banyak pasangan baru menyadari pentingnya pencatatan pernikahan setelah menghadapi kesulitan dalam urusan-urusan seperti pendaftaran anak ke sekolah, pembuatan akta kelahiran, pencatatan Kartu Keluarga, hingga pengurusan identitas anak.¹⁰⁸

Selain itu, wawancara juga menyentuh isu yang menarik, yakni pemahaman masyarakat terhadap konsep "*bahilah*". Dalam konteks tradisi keagamaan, *bahilah* umumnya merujuk pada tindakan keagamaan yang dilakukan untuk meringankan beban seseorang yang telah meninggal dunia, seperti membayar fidyah atau melakukan amal atas nama almarhum. Namun, dalam praktik masyarakat, istilah ini kadang digunakan dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam pernikahan ulang. Beberapa pasangan mencoba menggunakan istilah *bahilah* untuk menyebut strategi mereka dalam melegalkan pernikahan siri, misalnya dengan mengulang akad secara resmi

¹⁰⁸Dalam banyak kasus, ketiadaan buku nikah menyebabkan proses administrasi menjadi lebih rumit dan lambat, karena pihak yang berwenang memerlukan bukti sah hubungan hukum antara orang tua dan anak.

setelah sebelumnya ditolak oleh pengadilan. Narasumber menegaskan bahwa penggunaan istilah tersebut kurang tepat, dan bahkan cenderung menyesatkan, karena menyamakan upaya menyasati hukum dengan ibadah. Pernikahan, menurutnya, harus didasari pada kejujuran dan keterbukaan, bukan tipu daya atau manipulasi terhadap sistem hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsinya, KUA Liang Anggang memiliki tanggung jawab besar dalam mendampingi masyarakat agar memahami pentingnya pernikahan yang sah secara hukum. Mereka tidak hanya mencatat pernikahan, tetapi juga memberikan bimbingan pranikah, edukasi hukum, serta menjelaskan berbagai prosedur yang harus ditempuh jika pasangan ingin melegalkan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi sebelumnya. Namun, tugas ini tidak selalu mudah, terutama ketika dihadapkan pada pasangan yang memiliki riwayat pernikahan siri yang rumit, termasuk mereka yang telah menikah siri lebih dari satu kali atau pernah bercerai tanpa pencatatan sah di pengadilan.¹⁰⁹

Salah satu tantangan besar yang disebutkan narasumber adalah ketika pasangan memiliki anak dari pernikahan siri tersebut. Dalam kondisi seperti ini, status hukum anak menjadi tidak jelas, terutama dalam hal perwalian dan hak waris. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah secara hukum negara berisiko mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil mereka. Ini menjadi salah satu alasan mengapa KUA Liang Anggang sangat menekankan

¹⁰⁹Wawancara dengan KUA Liang Anggang pada 25 Januari 2024, Pukul 15.15.

pentingnya pencatatan pernikahan sejak awal. Dengan pencatatan resmi, status hukum pasangan dan anak-anak mereka akan terlindungi, dan mereka akan memiliki akses yang lebih mudah terhadap berbagai layanan publik.

Wawancara ini juga menyoroti pendekatan profesional yang diambil oleh KUA Liang Anggang dalam menghadapi setiap permohonan pernikahan ulang. Meskipun banyak pasangan datang dengan niat untuk memperbaiki status hukum pernikahan mereka, KUA tidak serta-merta menerima semua permohonan. Sebaliknya, mereka menjalankan fungsi verifikasi secara ketat, memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pasangan yang permohonannya ditolak oleh pengadilan diminta untuk melengkapi dokumen atau mendapatkan keputusan hukum terlebih dahulu sebelum dapat menikah ulang di KUA.

Secara keseluruhan, wawancara ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kompleksitas persoalan yang menyertai praktik pernikahan ulang, khususnya yang berakar dari pernikahan siri. KUA Liang Anggang berperan sebagai institusi yang berada di titik temu antara norma agama, hukum negara, dan kebutuhan masyarakat. Dalam posisi ini, mereka dituntut untuk tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memberikan edukasi hukum dan sosial yang mendalam. Mereka berupaya menyeimbangkan kepatuhan terhadap peraturan dengan pelayanan yang humanis kepada masyarakat. Lebih jauh lagi, wawancara ini menegaskan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah urusan administratif semata. Pencatatan

merupakan fondasi dari berbagai hak dan perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Ketika pencatatan diabaikan, maka konsekuensinya akan dirasakan dalam jangka panjang, baik dalam aspek keluarga, hukum, maupun sosial. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan sejak awal harus terus digalakkan. Dalam konteks ini, KUA memainkan peran vital sebagai ujung tombak negara dalam menjaga ketertiban hukum dalam urusan pernikahan, sekaligus menjadi penghubung antara kebijakan negara dengan realitas masyarakat di tingkat akar rumput.

Dengan demikian, wawancara dengan KUA Liang Anggang tidak hanya menampilkan tantangan teknis dalam pengelolaan pernikahan ulang, tetapi juga menggarisbawahi dinamika sosial yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Kompleksitas yang mereka hadapi tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga dengan pemahaman masyarakat tentang hukum, peran agama, serta nilai-nilai keadilan dalam keluarga. Dalam menangani semua ini, KUA dituntut untuk tidak hanya menjadi pelaksana administrasi, tetapi juga agen perubahan sosial yang mampu membentuk pemahaman hukum yang lebih baik di tengah masyarakat.

Tabel Hasil Wawancara KUA di Banjarbaru Mengenai Praktik *Bahilah*

No	Informan & Instansi	Definisi & Pemahaman <i>Bahilah</i>	Alasan Melakukan <i>Bahilah</i>	Proses <i>Bahilah</i>	Respon KUA
1	KUA Liang Anggang	<i>Bahilah</i> dipahami sebagai "akal-akalan" atau cara alternatif melegalkan pernikahan siri; diistilahkan sebagai "mencari jalan"	<ul style="list-style-type: none"> - Karena permohonan isbat nikah sering ditolak - Keperluan administratif (akta anak, KK) - Solusi pragmatis untuk legalitas 	Melakukan akad nikah ulang yang "resmi" agar bisa dicatat di KUA	Memahami bahwa ini terjadi karena prosedur isbat sulit, tapi secara hukum KUA tetap mencatat berdasarkan legalitas formal jika syarat terpenuhi
2	KUA Cempaka	<i>Bahilah</i> dipahami sebagai	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak pasangan tidak bisa 	Pasangan mengulang pernikahan	Banyak kasus ditolak pengadilan

		<p>bentuk "ibahan nikah siri" yang kemudian dicatatkan ulang secara sah</p>	<p>isbat karena usia di bawah 19 tahun</p> <p>- Wali nikah yang tidak sah (misalnya bukan ayah kandung)</p> <p>- Dorongan ingin memiliki buku nikah</p>	<p>dengan wali baru atau sesuai prosedur formal agar bisa dicatat</p>	<p>karena usia atau wali tidak sah; KUA mencatat ulang jika pasangan mengulang pernikahan sesuai syarat resmi</p>
3	<p>KUA Landasan Ulin</p>	<p><i>Bahilah</i> dianggap sebagai alternatif untuk mendapatkan pengakuan</p>	<p>- Kebutuhan akan dokumen resmi (buku nikah)</p> <p>- Ketakutan untuk</p>	<p>Nikah ulang dengan akad formal setelah sebelumnya siri</p>	<p>KUA hanya dapat mencatat jika ada dasar hukum yang sah seperti nikah ulang atau putusan</p>

		negara, meski awalnya pernikahan siri	mengajukan isbat - Masalah wali sering jadi kendala isbat		isbat; menghindari pelanggaran hukum
4	KUA Banjarbaru Selatan	<i>Bahilah</i> dipahami sebagai praktik untuk mendapat berkah atau legalitas, kadang juga ada unsur keagamaan dan sosial	- Ingin mendapat legalitas pernikahan - Alasan religius (dapat berkah) - Dorongan sosial dan komunitas	Nikah ulang di KUA setelah sebelumnya menikah dengan tokoh agama tanpa pencatatan resmi	KUA mencatat sesuai prosedur, tapi mengakui sering terjadi dualisme antara adat/sosial dan hukum negara
5	KUA Banjarbaru Utara	<i>Bahilah</i> dimaknai sebagai	- Tekanan sosial untuk melegalkan	Pasangan menikah ulang	KUA memverifikasi dokumen dan

		solusi dari pernikahan yang tidak tercatat, dilakukan demi legalitas dan kemudahan administrasi	hubungan - Prosedur isbat yang dianggap rumit dan mahal - Demi kepentingan anak dan keluarga	secara formal tanpa menyebut status nikah siri sebelumnya	jika formalitas terpenuhi, pencatatan dilakukan; namun tetap menyarankan jalur hukum formal jika memungkinkan
--	--	---	--	---	---

B. Analisis Data

1. Definisi *Bahilah* dalam Pernikahan Masyarakat Banjar

Bahilah dalam pemahaman tradisional masyarakat Banjar, semula merujuk pada sebuah praktik adat yang berkaitan dengan tebusan dosa atau bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Namun dalam praktik sosial kontemporer, istilah ini mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan. Dalam konteks pernikahan ulang di Kota Banjarbaru, khususnya bagi pasangan yang sebelumnya menikah secara siri (tidak tercatat secara negara), "*bahilah*" dimaknai sebagai sebuah strategi sosial dan administratif yang dilakukan oleh pasangan demi memperoleh legalitas formal atas hubungan pernikahan mereka.

Berdasarkan data wawancara dengan narasumber dari KUA Cempaka, praktik *bahilah* dalam pernikahan terjadi ketika sepasang suami istri yang telah menikah secara agama mengulang akad pernikahan di hadapan petugas KUA, tanpa mengungkapkan bahwa mereka sebelumnya telah menikah secara siri. Mereka menyatakan diri sebagai pasangan yang belum menikah, sehingga proses pencatatan di KUA dapat dilakukan tanpa prosedur isbat nikah yang formal dan lebih kompleks. Dalam hal ini, *bahilah* tidak hanya berfungsi sebagai "penghalusan administrasi", tetapi juga sebagai bentuk kompromi sosial terhadap keterbatasan sistem dan kesadaran hukum masyarakat.¹¹⁰

¹¹⁰Wawancara dengan Kepala KUA Cempaka pada 25 Januari 2024, Pukul 09.45.

Secara konseptual, *bahilah* muncul sebagai solusi pragmatis yang diambil oleh masyarakat dalam kondisi hukum yang rigid. Banyak pasangan mengalami penolakan ketika mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama karena alasan seperti usia yang belum cukup, ketidakterlibatan wali nikah yang sah, atau tidak tersedianya bukti sah pernikahan sebelumnya. Dalam situasi semacam ini, narasumber menyebut bahwa pasangan lebih memilih “jalan pintas” dengan cara mendaftarkan pernikahan ulang di KUA seolah-olah mereka baru menikah. *Bahilah* dalam konteks ini menjadi perwujudan dari dilema hukum antara aturan formal negara dan kebutuhan sosial yang mendesak.

Lebih jauh, narasumber dari KUA Banjarbaru Utara mengkritisi istilah "*bahilah*" yang digunakan dalam praktik pernikahan ulang ini. Menurut mereka, istilah tersebut seharusnya tidak digunakan karena memiliki makna asli yang berbeda dalam tradisi Banjar. Namun dalam praktiknya, mereka tetap menemui banyak pasangan yang memanipulasi status perkawinan sebelumnya demi kelancaran proses administrasi. Bagi sebagian petugas KUA, praktik seperti ini tidak sepenuhnya dapat dihindari karena sistem pencatatan belum terintegrasi secara nasional, sehingga sulit untuk melakukan verifikasi status pernikahan sebelumnya secara akurat.¹¹¹

Namun demikian, praktik *bahilah* ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif. Dari sudut pandang sosiologis, *bahilah* mencerminkan upaya adaptasi masyarakat terhadap struktur hukum formal yang

¹¹¹Wawancara dengan Kepala KUA Banjarbaru Utara pada 29 Januari 2024, Pukul 09.45.

belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika sosial. Dalam situasi di mana sistem hukum tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat—baik karena alasan prosedural, birokratis, atau bahkan stigma sosial—muncullah praktik-praktik alternatif seperti *bahilah* yang mengisi kekosongan antara hukum formal dan realitas sosial.

Dalam wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa pasangan yang melakukan *bahilah* sebenarnya memiliki motivasi yang sah secara sosial: mereka ingin anak-anak mereka memiliki akta kelahiran, ingin mendapatkan buku nikah sebagai bukti resmi, dan ingin mendapatkan perlindungan hukum atas status pernikahan mereka. Dalam hal ini, *bahilah* menjadi strategi survival sosial yang diambil masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai keluarga, sekalipun cara yang diambil melibatkan kebohongan administratif.

Secara antropologis, praktik *bahilah* ini juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai adat dan agama berpadu dalam cara masyarakat mengatur urusan domestik mereka. Dalam masyarakat Banjar yang kuat nilai religiusnya, pernikahan secara agama sudah dianggap cukup sah secara moral. Namun ketika kebutuhan akan dokumen formal muncul, terutama dalam urusan birokrasi modern seperti sekolah, rumah sakit, dan pengurusan dokumen sipil, masyarakat dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan sistem formal yang belum tentu mereka pahami sepenuhnya. Di sinilah *bahilah* muncul sebagai jembatan antara hukum agama dan hukum negara.

Menariknya, narasumber dari KUA juga mengakui adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar pasangan—baik dari keluarga maupun tokoh masyarakat—yang mendesak agar pernikahan segera dicatat tanpa menyinggung masa lalu. Dalam konteks ini, petugas KUA berada dalam posisi dilematis: menjalankan hukum secara formal atau menanggapi kebutuhan riil masyarakat. Situasi ini membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana hukum seharusnya berfungsi dalam masyarakat, terutama dalam konteks hukum keluarga yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial dan religius.

Narasumber juga menyatakan bahwa dalam banyak kasus, pasangan yang melakukan *bahilah* bukanlah ingin menghindari hukum, melainkan ingin menyesuaikan diri dengan hukum yang mereka pahami. Ketika mereka tidak bisa memahami prosedur isbat nikah atau tidak mampu secara ekonomi untuk mengurusnya, maka pernikahan ulang di KUA dengan menyembunyikan informasi masa lalu dianggap sebagai opsi yang “masuk akal” dan tidak membahayakan siapa pun. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya perlu ditegakkan, tetapi juga dijelaskan dan disosialisasikan secara efektif.

Sebagai penutup, definisi *bahilah* dalam konteks pernikahan menurut narasumber bukan sekadar istilah adat yang berubah makna, melainkan manifestasi dari dinamika sosial, tekanan struktural, dan kebutuhan praktis masyarakat terhadap legalitas pernikahan. *Bahilah* adalah wajah informal dari legalitas; ia muncul karena hukum formal terlalu kaku untuk menjangkau kompleksitas kehidupan nyata. Oleh karena itu, solusi jangka panjang terhadap

praktik *bahilah* bukanlah semata-mata dengan memperketat verifikasi di KUA, tetapi dengan membangun sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan membumi bagi masyarakat akar rumput.

2. Praktik Bahilah dalam Pernikahan Ulang di Masyarakat Banjar

Pernikahan, dalam konteks sosial maupun hukum, merupakan institusi fundamental yang tidak hanya menyangkut hubungan antara dua individu, melainkan juga membawa dampak luas terhadap struktur masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif Islam, pernikahan memiliki kedudukan yang sangat sakral. Ia dipandang sebagai bentuk ibadah yang tidak hanya menyatukan pasangan secara lahiriah, tetapi juga membawa konsekuensi hukum dan tanggung jawab moral, baik di hadapan Tuhan maupun di mata masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan idealnya dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan syariat agama sekaligus prosedur legal yang diatur oleh negara.¹¹²

Namun, dalam realitas sosial yang berkembang di masyarakat Banjarbaru, idealitas tersebut tidak selalu tercapai. Masih banyak pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga tanpa mencatatkan pernikahannya secara resmi di lembaga negara yang berwenang. Praktik ini lazim disebut sebagai pernikahan siri yakni pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak terdaftar dalam administrasi negara. Fenomena ini bukanlah hal baru dan telah

¹¹²Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 35.

menjadi bagian dari dinamika masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Banyak pasangan, karena berbagai alasan, memilih untuk menikah secara siri terlebih dahulu, dan baru kemudian mencari cara untuk melegalkan pernikahan mereka di kemudian hari.

Salah satu dampak turunan dari praktik pernikahan siri yang sering ditemukan di lapangan adalah munculnya bentuk pernikahan ulang yang dikenal secara lokal dengan istilah *bahilah*. Istilah ini, meskipun tidak secara eksplisit terdapat dalam terminologi hukum formal, telah berkembang menjadi bagian dari praktik sosial yang memiliki makna tersendiri di kalangan masyarakat Banjar. Dalam konteks ini, *bahilah* merujuk pada tindakan pasangan yang sebelumnya telah menikah secara siri, kemudian kembali melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), seolah-olah mereka belum pernah menikah sebelumnya. Hal ini dilakukan agar mereka bisa memperoleh buku nikah resmi dari negara tanpa harus melalui proses hukum berupa isbat nikah di pengadilan agama.

Secara lebih rinci, praktik *bahilah* ini dapat dipahami sebagai suatu cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk melewati rintangan administratif dan hukum yang menghalangi pengesahan pernikahan mereka. Banyak pasangan yang memilih jalur ini karena dianggap lebih sederhana, lebih cepat, dan tidak memerlukan biaya sebesar proses isbat nikah di pengadilan. Mereka cukup memenuhi persyaratan administratif di KUA dan mengulang akad nikah secara formal di hadapan petugas, sehingga pernikahan mereka bisa tercatat dalam

sistem negara. Dengan demikian, mereka pun memperoleh legalitas pernikahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administratif, seperti membuat kartu keluarga, mendaftarkan anak ke sekolah, atau mengurus akta kelahiran.

Meskipun demikian, fenomena ini menyimpan sejumlah persoalan hukum dan etika. Secara prinsip, pernikahan ulang yang dilakukan tanpa menyatakan adanya pernikahan siri sebelumnya bisa dianggap sebagai bentuk manipulasi administratif. Pasangan yang melakukan *bahilah* tidak menjalani prosedur pengesahan yang seharusnya mereka tempuh jika memang telah menikah secara agama, yaitu melalui isbat nikah di pengadilan agama. Dalam konteks ini, tindakan tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk menyasiasi sistem hukum, dengan cara memalsukan status pernikahan demi memperoleh pengakuan legal secara cepat dan murah. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keabsahan pencatatan pernikahan yang dilakukan berdasarkan informasi yang tidak sepenuhnya jujur.

Selain itu, dari sudut pandang hukum negara, setiap pernikahan yang terjadi sebelumnya baik tercatat maupun tidak tetap memiliki konsekuensi hukum yang harus diakui dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum akad nikah baru dapat dilakukan secara sah.¹¹³ Oleh karena itu, pernikahan ulang yang dilakukan tanpa adanya putusan isbat atau pengesahan dari pengadilan agama menimbulkan ambiguitas dalam sistem hukum. KUA sebagai institusi pencatat

¹¹³Muslihah Ananda Putri Pratiwi, "Bisakah Perjanjian Pra Nikah Dibuat Setelah Menikah?", *Perqara*, 3 September 2024, 1

pernikahan negara sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap akad nikah yang dicatat telah memenuhi syarat secara hukum dan tidak melanggar prosedur. Namun dalam praktiknya, keterbatasan informasi dan kesulitan dalam proses verifikasi membuat sejumlah pasangan berhasil melakukan *bahilah* tanpa terdeteksi.

Lebih jauh, praktik ini juga menggambarkan adanya kesenjangan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Banyak pasangan yang menjalani pernikahan siri tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Mereka baru menyadari pentingnya pencatatan pernikahan ketika menghadapi kendala administratif dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika ingin mendaftarkan anak ke sekolah atau mengurus surat pindah domisili. Kesadaran ini biasanya datang terlambat, dan pada saat itu pasangan sudah berada dalam kondisi yang menyulitkan. Akibatnya, mereka mencari solusi yang paling cepat dan mudah agar pernikahan mereka dapat diakui secara resmi yang dalam hal ini adalah dengan melakukan *bahilah*.

Faktor lain yang mendorong munculnya praktik ini adalah persoalan ekonomi. Proses isbat nikah di pengadilan agama, meskipun pada prinsipnya terbuka bagi siapa saja, tetap memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit. Bagi masyarakat menengah ke bawah, biaya pengacara, transportasi ke pengadilan, serta waktu yang harus diluangkan menjadi beban tersendiri. Dalam kondisi seperti ini, pernikahan ulang di KUA tanpa isbat dipandang sebagai

solusi pragmatis yang bisa menghindarkan mereka dari proses yang dianggap rumit dan mahal.

Namun, solusi pragmatis ini tidak serta-merta menyelesaikan seluruh permasalahan. Justru, dalam jangka panjang, praktik *bahilah* bisa menimbulkan persoalan hukum baru. Misalnya, dalam hal hak waris, status anak, atau ketika terjadi perceraian. Ketika pernikahan sebelumnya tidak pernah dicatat dan pernikahan resmi yang baru tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, maka akan sulit menentukan status hukum hubungan keluarga tersebut secara utuh. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan ini bisa menimbulkan konflik antara anggota keluarga, terutama jika menyangkut pembagian warisan atau hak asuh anak.

Dalam konteks pengawasan, KUA juga menghadapi tantangan yang tidak mudah. Meskipun telah tersedia sistem pencatatan dan regulasi yang cukup ketat, petugas KUA kerap kali kesulitan mendeteksi apakah pasangan yang hendak menikah pernah menjalani pernikahan siri sebelumnya atau tidak. Ketika pasangan datang dengan dokumen lengkap dan menyatakan bahwa mereka belum pernah menikah, petugas memiliki keterbatasan untuk melakukan verifikasi lebih jauh. Apalagi jika tidak ada laporan atau data lain yang menunjukkan adanya pernikahan sebelumnya. Dalam kondisi seperti ini, *bahilah* menjadi praktik yang secara teknis sulit untuk ditolak.

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif antara lembaga negara, tokoh agama, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan

pentingnya kejujuran dalam proses pernikahan. Edukasi tentang dampak hukum dari pernikahan siri dan pentingnya pencatatan sejak awal harus terus disosialisasikan. Selain itu, mekanisme isbat nikah perlu dibuat lebih mudah diakses dan lebih terjangkau agar masyarakat tidak lagi melihatnya sebagai beban. Dengan demikian, masyarakat tidak terdorong untuk mencari jalan pintas yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.

Secara keseluruhan, fenomena *bahilah* dalam praktik pernikahan ulang di Kota Banjarbaru menunjukkan bahwa persoalan pernikahan tidak hanya berkaitan dengan aspek agama dan cinta, tetapi juga sangat terkait dengan pemahaman hukum, kondisi sosial-ekonomi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Praktik ini menjadi cerminan bahwa masih ada jurang antara regulasi formal yang ada dan realitas kehidupan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih utuh, baik dari sisi hukum, sosial, maupun budaya, diharapkan ke depan praktik pernikahan bisa dilakukan secara lebih bertanggung jawab, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Faktor Pendorong Munculnya Praktik Bahilah

Fenomena praktik pernikahan ulang melalui mekanisme *bahilah* di tengah masyarakat tidak dapat dipisahkan dari serangkaian faktor yang kompleks. Keputusan pasangan untuk menempuh jalur ini bukanlah pilihan yang muncul secara spontan, melainkan merupakan respons terhadap hambatan yang mereka hadapi dalam menempuh prosedur hukum formal. Berdasarkan

hasil wawancara dengan sejumlah petugas Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, terungkap bahwa praktik ini berkembang sebagai alternatif ketika pasangan merasa proses legalisasi pernikahan mereka melalui jalur pengadilan agama terlalu sulit atau bahkan mustahil ditempuh.

Salah satu hambatan paling signifikan adalah prosedur isbat nikah yang harus diajukan ke pengadilan agama. Dalam praktiknya, proses ini sering kali dipandang rumit dan tidak selalu memberikan kepastian hasil.¹¹⁴ Data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 12 permohonan isbat nikah yang diajukan di wilayah tersebut, hanya tiga yang dikabulkan oleh pengadilan. Sembilan permohonan lainnya ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku. Beberapa kasus penolakan disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen seperti surat keterangan nikah, saksi yang tidak hadir, atau tidak adanya bukti tertulis tentang pernikahan sebelumnya.

Selain itu, salah satu alasan dominan lainnya adalah persoalan usia pasangan saat menikah. Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, menyatakan bahwa batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, tidak sedikit pasangan yang menikah siri ketika mereka masih di bawah usia tersebut. Meski telah menjalani kehidupan rumah tangga dan bahkan memiliki

¹¹⁴Sabaruddin Akbar, *Analisis Penetapan Isbat Nikah Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai Tahun 2021* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022), 71.

anak, tanpa adanya dispensasi resmi dari pengadilan, isbat nikah tidak dapat dikabulkan. Pengadilan berpegang teguh pada ketentuan hukum demi mencegah praktik pernikahan anak yang berdampak buruk secara sosial dan psikologis.

Faktor berikutnya yang tidak kalah berpengaruh adalah keterbatasan ekonomi. Proses hukum di pengadilan agama, meskipun terbuka bagi seluruh masyarakat, tetap membutuhkan biaya. Tidak hanya untuk administrasi, tetapi juga biaya transportasi, fotokopi dokumen, legalisasi, dan dalam beberapa kasus, pasangan bahkan merasa perlu menggunakan jasa pengacara agar permohonan mereka lebih terarah. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, biaya ini tentu menjadi beban yang signifikan. Hal ini diperparah oleh minimnya pemahaman mengenai prosedur hukum, sehingga pasangan lebih memilih jalur yang dianggap sederhana dan terjangkau, yaitu dengan menikah ulang langsung di KUA.

Pernikahan ulang melalui *bahilah* dilakukan dengan cara datang ke KUA seolah-olah belum pernah menikah sebelumnya. Dalam praktiknya, pasangan tersebut tidak mengungkapkan bahwa mereka telah menikah siri. Selama semua dokumen administrasi lengkap dan tidak ada catatan pernikahan terdahulu di sistem, petugas KUA umumnya tidak memiliki alasan untuk menolak permohonan tersebut. Hal ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk memperoleh buku nikah tanpa melalui isbat nikah yang sah secara hukum. Namun motivasi pasangan tidak hanya terbatas

pada hambatan administratif dan finansial. Tekanan sosial juga menjadi faktor penting. Dalam masyarakat Banjar, pernikahan yang sah menurut negara memiliki nilai sosial yang tinggi. Pasangan yang tidak memiliki buku nikah kerap kali dipandang negatif oleh lingkungan sekitar. Mereka dianggap belum resmi menikah atau bahkan menjalani hubungan di luar pernikahan, meskipun telah menjalani kehidupan rumah tangga bertahun-tahun. Stigma ini menimbulkan tekanan psikologis yang kuat, terutama pada perempuan yang dianggap paling terdampak secara sosial dalam kasus ini.

Tekanan tersebut meningkat ketika pasangan telah memiliki anak. Tanpa pencatatan resmi, anak-anak dari pernikahan siri sering kali mengalami hambatan dalam mengakses hak-hak dasar mereka. Proses pengurusan akta kelahiran menjadi sulit karena diperlukan bukti sah pernikahan orang tua. Tanpa akta lahir, anak-anak akan menghadapi kesulitan saat ingin bersekolah, mengakses layanan kesehatan seperti BPJS, atau dalam proses administrasi lainnya yang membutuhkan identitas hukum yang jelas.¹¹⁵

Situasi ini membuat pasangan merasa terdesak untuk segera memperoleh buku nikah, demi masa depan anak-anak mereka. Sebagian pasangan juga berusaha untuk menjaga kehormatan keluarga di mata masyarakat. Dalam budaya kolektif seperti di Kalimantan Selatan, nama baik keluarga merupakan hal yang sangat dijaga. Oleh karena itu, pernikahan ulang

¹¹⁵Sabaruddin Akbar, Analisis Penetapan Isbat Nikah Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022), 71.

di KUA dipandang sebagai cara untuk menghindari rasa malu serta menjaga kehormatan keluarga besar. Bahkan dalam beberapa kasus, keputusan untuk menikah ulang tidak datang dari pasangan itu sendiri, melainkan didorong oleh desakan orang tua atau tokoh masyarakat yang ingin "meresmikan" hubungan mereka agar dapat diterima secara sosial.

Dari sudut pandang hukum, praktik ini menimbulkan tantangan tersendiri. KUA sebagai lembaga resmi negara yang bertugas mencatat setiap peristiwa pernikahan tidak selalu memiliki alat atau mekanisme yang cukup untuk mengidentifikasi status pernikahan sebelumnya yang tidak tercatat. Petugas hanya dapat memverifikasi berdasarkan dokumen yang diserahkan. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya pencatatan pernikahan baru tanpa pengetahuan akan status hukum sebelumnya, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan konflik, terutama jika pasangan tersebut pernah menikah atau bercerai secara siri beberapa kali.

KUA juga menghadapi kendala ketika pasangan yang menikah ulang tersebut kemudian mengalami perselisihan hukum, seperti perceraian atau sengketa hak asuh anak. Karena pernikahan awal tidak diakui secara hukum, maka segala akibat hukumnya pun tidak dapat diurus secara sah. Misalnya, perempuan yang tidak memiliki buku nikah dari pernikahan pertamanya akan kesulitan mengurus hak nafkah, gono-gini, atau harta warisan. Anak-anak pun akan berada dalam posisi yang rentan secara hukum karena status mereka menjadi samar di mata negara. Dalam wawancara yang dilakukan dengan

berbagai pihak di KUA, muncul usulan agar sistem pencatatan pernikahan diperkuat dengan basis data yang terintegrasi secara nasional.¹¹⁶

Sebagai solusi jangka panjang, pendekatan preventif perlu dikedepankan. Sosialisasi dan edukasi hukum harus lebih gencar dilakukan, terutama di wilayah-wilayah yang rawan terhadap praktik pernikahan siri. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pencatatan pernikahan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari perlindungan hukum dan hak-hak sipil.

Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kelas bawah, seperti penyediaan layanan isbat nikah gratis atau bersubsidi bagi pasangan yang tidak mampu. Secara keseluruhan, praktik *bahilah* mencerminkan adanya kesenjangan antara sistem hukum yang berlaku dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Meskipun tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ideal, praktik ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Oleh karena itu, penanganan fenomena ini tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga harus melibatkan pemahaman sosiologis, budaya, serta kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum dapat berjalan secara adil dan responsif terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

¹¹⁶Dengan sistem tersebut, setiap permohonan pencatatan nikah dapat dicek silang dengan data yang ada, sehingga praktik *bahilah* yang menyembunyikan status sebelumnya dapat diminimalisir. Namun, penerapan sistem semacam ini tentu memerlukan koordinasi antarlembaga dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah.

4. Implikasi Hukum dan Sosial dari Praktik Bahilah

Praktik *bahilah* yang terjadi dalam konteks pernikahan ulang di tengah masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat Banjar, merupakan fenomena sosial yang kompleks dan sarat dengan berbagai konsekuensi, baik dari sisi hukum maupun dari sisi sosial. Praktik ini secara umum merujuk pada tindakan pasangan suami istri yang sebelumnya telah menikah secara siri, namun kemudian melangsungkan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa mengungkapkan status pernikahan siri mereka yang terdahulu. Dengan cara ini, mereka berupaya memperoleh buku nikah resmi dari negara tanpa melalui mekanisme isbat nikah yang seharusnya dilakukan melalui pengadilan agama.

Secara yuridis, tindakan ini menimbulkan sejumlah permasalahan serius, terutama terkait dengan prinsip transparansi dalam administrasi pencatatan pernikahan. Dalam hukum positif Indonesia, pernikahan yang dianggap sah bukan hanya yang dilangsungkan menurut hukum agama, tetapi juga yang dicatatkan secara resmi oleh negara melalui lembaga yang berwenang, yaitu KUA bagi umat Islam. Ketika pasangan memilih untuk menyembunyikan status pernikahan siri mereka dan langsung mencatatkan pernikahan ulang seolah-olah belum pernah menikah, maka tindakan tersebut berpotensi dianggap sebagai bentuk manipulasi administrasi negara.

Hal ini secara langsung bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang keduanya menekankan pentingnya pencatatan sebagai bukti autentik suatu pernikahan. Konsekuensi hukum dari tindakan ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan itu sendiri, tetapi juga berdampak pada anak-anak yang lahir dari pernikahan siri sebelumnya. Dalam sistem hukum negara, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatat secara resmi berada dalam posisi hukum yang lemah.

Jika pernikahan orang tuanya tidak pernah disahkan melalui isbat nikah, maka status hukum anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan menurut hukum negara, meskipun secara agama anak tersebut mungkin dianggap sah. Hal ini berimplikasi luas terhadap pengurusan dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, anak tersebut juga berpotensi menghadapi kesulitan dalam menuntut hak-haknya di masa depan, terutama yang berkaitan dengan hak waris dan hak perwalian.

Dari sudut pandang sosial, praktik *bahilah* mencerminkan adanya ketegangan antara norma hukum negara dan norma sosial-keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Di banyak komunitas lokal, termasuk masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, sahnyanya suatu pernikahan menurut hukum agama sering kali lebih diprioritaskan daripada legalitas administratif yang ditetapkan oleh negara. Dalam pandangan mereka, selama pernikahan telah memenuhi

syarat dan rukun nikah dalam Islam, maka pernikahan tersebut dianggap sah dan tidak lagi perlu diajukan ke lembaga negara untuk disahkan. Oleh karena itu, ketika pasangan tersebut merasa terdesak untuk memperoleh pengakuan hukum formal—biasanya karena alasan administratif seperti kebutuhan mengurus akta kelahiran anak atau mengakses layanan publik—mereka cenderung mencari jalan pintas, salah satunya dengan melakukan praktik *bahilah*.

Dalam realitasnya, praktik ini sering kali dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Pertama adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur isbat nikah. Banyak pasangan tidak memahami bahwa untuk melegalkan pernikahan siri, mereka tidak dapat langsung mencatatkan pernikahan ulang di KUA, melainkan harus melalui prosedur hukum yang sah, yakni dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Ketidaktahuan ini berkontribusi pada kecenderungan masyarakat untuk menghindari jalur hukum resmi dan memilih alternatif yang dianggap lebih mudah dan cepat.

Faktor kedua adalah aspek ekonomi. Prosedur isbat nikah tidak hanya memerlukan pemahaman hukum, tetapi juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Biaya pengurusan dokumen, jasa pendamping hukum, dan biaya persidangan bisa menjadi beban tambahan bagi pasangan yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Dalam situasi seperti ini, pernikahan

ulang di KUA tanpa proses isbat sering kali dipandang sebagai solusi praktis yang murah dan tidak rumit.

Selain itu, tekanan dari lingkungan sosial juga memainkan peran penting dalam mendorong praktik ini. Masyarakat sekitar, keluarga besar, atau bahkan tokoh agama lokal kerap mendesak pasangan untuk segera meresmikan pernikahan mereka secara administratif, terutama jika pasangan tersebut sudah memiliki anak. Desakan ini sering kali tidak diiringi dengan pemahaman prosedural yang memadai, sehingga pasangan akhirnya memilih langkah tercepat yang tersedia—meskipun langkah tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Implikasi dari praktik ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan lembaga KUA sebagai institusi pencatat pernikahan resmi. Dalam posisi ini, KUA sering kali berada dalam dilema. Di satu sisi, mereka berkewajiban untuk mencatat setiap pernikahan yang memenuhi syarat administratif. Namun di sisi lain, mereka juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan menolak pencatatan pernikahan jika diketahui bahwa pasangan telah menikah sebelumnya secara siri tanpa proses isbat.

Dalam wawancara dengan petugas KUA di Banjarbaru, diketahui bahwa kasus seperti ini tidak jarang ditemukan, dan sering kali menimbulkan kebingungan administratif karena tidak adanya kejelasan status hukum dari pernikahan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *bahilah* bukan hanya persoalan individu, tetapi juga menjadi tantangan institusional bagi

lembaga yang berwenang dalam pencatatan pernikahan. Dari sudut pandang kebijakan publik, praktik *bahilah* dapat menjadi indikator lemahnya sistem edukasi hukum di tingkat akar rumput. Kurangnya penyuluhan hukum mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan prosedur isbat nikah menyebabkan masyarakat mengambil jalan pintas yang justru berpotensi menimbulkan masalah hukum yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, perlu ada upaya sistematis dari pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama dan lembaga peradilan agama, untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang masih tinggi angka pernikahan sirinya.

Selain itu, pendekatan kultural juga diperlukan dalam menangani praktik *bahilah* ini. Mengingat bahwa banyak masyarakat lebih mengutamakan nilai-nilai agama dalam melihat sah atau tidaknya sebuah pernikahan, maka edukasi hukum sebaiknya juga dilakukan dengan pendekatan religius yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Pelibatan tokoh agama, alim ulama, dan pemuka masyarakat dalam kampanye kesadaran hukum bisa menjadi strategi yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara hukum negara dan norma sosial-keagamaan.

Secara keseluruhan, praktik *bahilah* dalam pernikahan ulang adalah sebuah cerminan nyata dari dinamika hukum dan sosial yang terjadi di lapisan masyarakat. Praktik ini tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupi masyarakat tempat ia tumbuh. Oleh karena itu, solusi

terhadap praktik ini tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan hukum semata, tetapi harus melibatkan pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

Dalam jangka panjang, pembenahan sistem hukum keluarga di Indonesia perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Penyederhanaan prosedur isbat nikah, pemberian bantuan hukum bagi keluarga tidak mampu, serta peningkatan akses informasi hukum adalah langkah-langkah yang dapat mengurangi kecenderungan masyarakat untuk melakukan praktik *bahilah*. Jika hal-hal ini dapat diwujudkan secara konsisten, maka cita-cita hukum nasional untuk menciptakan sistem keluarga yang tertib dan terlindungi secara hukum dapat lebih mudah tercapai.

5. Respon KUA terhadap Praktik Bahilah dalam Pernikahan Ulang

Fenomena *bahilah* dalam konteks pernikahan ulang merupakan gejala sosial yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat, khususnya dalam wilayah hukum dan keagamaan. Praktik ini terjadi ketika pasangan yang telah menikah secara siri atau tidak tercatat secara resmi di KUA kemudian mengajukan pernikahan ulang tanpa menyatakan riwayat pernikahan sebelumnya. Dengan demikian, mereka seolah-olah menikah untuk pertama kalinya secara resmi, dan upaya ini bertujuan untuk memperoleh legalitas administratif berupa buku nikah. Dalam menanggapi keadaan ini, respon Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi negara yang berwenang dalam

pencatatan pernikahan menunjukkan sedikit variasi kebijakan dan pendekatan, tergantung pada pemahaman masing-masing kantor terhadap kompleksitas sosial dan hukum yang terjadi di lapangan.

Sebagai lembaga pelaksana teknis dari Kementerian Agama, KUA memiliki mandat untuk mencatat setiap pernikahan umat Islam yang sah menurut agama dan memenuhi syarat administratif yang telah ditentukan oleh negara. Dalam kerangka tersebut, KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menerjemahkan regulasi hukum perkawinan ke dalam praktik sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, petugas KUA menghadapi dilema antara menjalankan tugas secara normatif sesuai regulasi, dan mengakomodasi realitas sosial yang penuh tekanan dari keluarga, tokoh masyarakat, atau pasangan yang terdesak untuk segera memperoleh status hukum.

Respon yang beragam dari KUA terhadap praktik *bahilah* tercermin dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa KUA di wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. KUA Banjarbaru Selatan, misalnya, menegaskan bahwa secara normatif mereka hanya akan mencatat pernikahan yang memenuhi syarat administratif sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, selama dokumen seperti KTP, KK, surat izin dari orang tua (jika diperlukan), dan surat keterangan belum menikah atau status cerai telah lengkap, maka mereka akan melayani proses akad nikah dan pencatatan tanpa mempertanyakan lebih lanjut sejarah pernikahan pasangan

tersebut. Hal ini dilakukan karena KUA tidak memiliki kewenangan investigatif untuk menyelidiki status pernikahan sebelumnya jika tidak ada pelaporan atau bukti yang jelas.

Namun, di sisi lain, terdapat juga KUA seperti KUA Cempaka yang lebih fleksibel dalam menyikapi fenomena *bahilah*. Mereka cenderung memandang praktik ini sebagai bentuk penyesuaian masyarakat terhadap sistem hukum yang terlalu rumit dan tidak sepenuhnya akomodatif terhadap kondisi nyata di lapangan. Dalam perspektif mereka, selama niat pasangan adalah untuk melegalkan pernikahan mereka dan melindungi hak-hak anak serta keluarga, maka pendekatan yang lebih lunak perlu dipertimbangkan. Pendekatan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa hukum tidak berdiri dalam ruang hampa, tetapi harus selalu dipertemukan dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi KUA dalam menangani kasus-kasus seperti ini adalah keterbatasan sistem dalam memverifikasi riwayat pernikahan seseorang. Karena banyak pernikahan siri dilakukan secara informal dan tidak tercatat dalam sistem administrasi negara, maka tidak ada cara bagi petugas KUA untuk mengetahui apakah seseorang telah menikah sebelumnya kecuali pasangan tersebut mengaku atau terdapat laporan dari pihak ketiga. Situasi ini diperparah dengan tidak adanya sistem pencatatan pernikahan yang terintegrasi secara nasional dan lintas wilayah. Dalam kondisi seperti ini, KUA

hanya dapat bergantung pada kelengkapan dokumen administratif yang diserahkan oleh pasangan, tanpa mampu melakukan pengecekan lebih lanjut.

Tekanan dari lingkungan sosial juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa kasus, keluarga besar, tokoh agama, atau bahkan aparat desa turut mendesak KUA untuk segera menikahkan pasangan tanpa mengungkit persoalan riwayat pernikahan mereka. Tekanan semacam ini bisa sangat kuat, terutama dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma kehormatan dan kesopanan. Dalam situasi semacam ini, petugas KUA sering kali dihadapkan pada pilihan sulit antara menegakkan aturan secara ketat dan menjaga harmoni sosial di lingkungan masyarakatnya.¹¹⁷

Masalah lainnya adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak dicatat secara resmi. Banyak pasangan yang menganggap bahwa pencatatan pernikahan hanyalah formalitas administratif tanpa implikasi hukum yang berarti. Pandangan ini mencerminkan rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat, khususnya terkait dengan hak-hak hukum anak, hak waris, status perwalian, dan akses terhadap layanan publik yang mensyaratkan dokumen pernikahan. Kurangnya edukasi ini menjadikan praktik *bahilah* dianggap sebagai solusi yang sah, padahal secara hukum dapat berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari.

¹¹⁷Tidak jarang pula, adanya kedekatan personal antara tokoh masyarakat dan petugas KUA menjadi faktor yang turut memengaruhi keputusan yang diambil di lapangan.

Dalam menanggapi keadaan ini, sebagian KUA mulai menyadari perlunya pendekatan yang lebih komprehensif. Beberapa inisiatif seperti sosialisasi hukum pernikahan, penyuluhan tentang isbat nikah, serta kerja sama dengan pengadilan agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mulai dilakukan, meskipun belum merata. Pendekatan preventif semacam ini penting untuk mencegah terulangnya praktik *bahilah* dan mendorong masyarakat untuk menyelesaikan status pernikahan mereka melalui jalur yang benar secara hukum.

Selain edukasi, perlu juga adanya inovasi dalam sistem administrasi perkawinan yang lebih transparan dan terintegrasi. Misalnya, pengembangan basis data nasional tentang status pernikahan yang dapat diakses secara terbatas oleh petugas KUA dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya pencatatan ulang oleh pasangan yang sebenarnya telah menikah sebelumnya. Sistem ini juga dapat membantu mempercepat proses verifikasi dan memastikan bahwa setiap pernikahan yang dicatat benar-benar sesuai dengan kondisi hukum pasangan yang bersangkutan.

Penting juga untuk dicatat bahwa upaya mengatasi praktik *bahilah* tidak cukup hanya dari sisi regulasi dan sistem administrasi. Pendekatan kultural dan partisipatif yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta organisasi kemasyarakatan menjadi sangat penting untuk membangun pemahaman kolektif tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang sah. Dalam masyarakat Banjar, misalnya, peran tokoh agama sangat dominan dalam membentuk opini

publik tentang sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Oleh karena itu, jika tokoh-tokoh ini dapat diberdayakan untuk menyosialisasikan pentingnya pencatatan pernikahan, maka potensi keberhasilan edukasi hukum di tingkat akar rumput akan jauh lebih besar.

Secara keseluruhan, respon KUA terhadap fenomena *bahilah* dalam pernikahan ulang menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai jembatan antara hukum negara dan nilai-nilai sosial masyarakat. Dalam menjalankan perannya tersebut, KUA dihadapkan pada berbagai tantangan mulai dari sistem yang belum terintegrasi, tekanan sosial, hingga rendahnya literasi hukum masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bersifat holistik, mencakup pembenahan sistem, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pelibatan aktor-aktor lokal dalam proses edukasi dan sosialisasi. Dengan adanya sinergi antara pendekatan hukum, kultural, dan administratif, diharapkan praktik *bahilah* dalam pernikahan ulang dapat diminimalkan, dan masyarakat didorong untuk menempuh jalur hukum yang sesuai dalam melegalkan status perkawinan mereka. Melalui upaya kolektif ini pula, perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka dapat lebih terjamin dalam kerangka sistem hukum nasional yang adil dan inklusif.